

TAJUK RENCANA

Silaturahmi Politik

SILATURAHMI politik marak lagi. Fenomena semacam ini rutin terjadi setiap menjelang pemilihan umum (Pemilu), khususnya pemilihan presiden (Pilpres). Lihat saja, sesama pimpinan partai politik (parpol) bertemu. Biasa, untuk komunikasi politik, membahas nasib dan masa depan bangsa, tentu saja juga untuk peninjauan koalisi menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Diprediksi, silaturahmi sesama elite politik ini akan semakin intens sampai pimpinan menjelang penentuan pasangan calon presiden-wakil presiden.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah bertemu dengan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan dan Ketua DPP PPP Suharto Monoarfa. Kemudian Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketua DPP PKB A Muhaimin Iskandar. Terkini, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikh. "Belum koalisi, baru saling melihat, menjajaki, mencari kesamaan," kata Surya Paloh, (KR, Kamis 23/6).

Silaturahmi yang dalam bahasa Arabnya *silaturahmi* merupakan hal yang baik. *Silah* berarti menyambung dan *rahim* adalah kasih sayang. Jadi, silaturahmi adalah jalan untuk menyambung kasih sayang. Islam juga mengajarkan umatnya untuk gemar bersilaturahmi. Hikmah silaturahmi antara lain memperpanjang usia dan memperluas rezeki. Bahkan Islam melarang umatnya memutus tali silaturahmi. Karena itu, proses panjang pemilu juga tidak jadi ajang untuk memutus tali silaturahmi.

Jadi kalau para elite politik saling bersilaturahmi merupakan hal yang positif dan sudah semestinya dilakukan. Dengan saling silaturahmi, maka ketegangan politik atau kesalahpahaman yang sering terjadi, akan menjadi cair dan sejuk kembali. Bisa ajang untuk mengurai masalah dan mencari solusinya. Bahkan permusuhan akan menjadi perdamaian. Harapannya, hubungan baik yang terjalin sesama para tokoh, akan berim-

bas pada hubungan baik juga di kalangan para pendukungnya, sehingga tercipta kerukunan.

Saat bersilaturahmi dan saling berdialog, biasanya juga muncul adanya kesamaan atau titik temu, baik kesamaan pandangan maupun kesamaan visi dan perjuangan, meski mungkin sebelumnya terkesan banyak perbedaan, bahkan menjadi terlupakan, dan mungkin akan berlanjut terjalin saling kerjasama atau koalisi.

Pendek kata, silaturahmi memang perlu dilakukan oleh semua elemen bangsa, baik oleh kalangan elite maupun warga biasa. Bahkan mestinya silaturahmi sesama elite politik tidak hanya dilakukan pada saat-saat menjelang Pemilu, tetapi juga kapan saja, apalagi kalau sedang perlu, misalnya dalam suasana genting. Tidak hanya silaturahmi setiap menjelang pemilu.

Silaturahmi hendaknya tidak hanya dilakukan oleh sesama pimpinan parpol yang sudah berkoalisi, tetapi juga dengan pimpinan parpol yang ada di koalisi lain. Termasuk saat-saat genting di tengah-tengah masa kampanye. Hal ini perlu dilakukan untuk meredakan suasana. Apalagi meski saat masa kampanye 'berhadapan', usai pemilu bisa jadi juga duduk bersama. Bahkan dari parpol koalisi yang kalahpun tetap bisa ikut menikmati kekuasaan yang diraih rivalnya, seperti yang terjadi selama ini.

Jadi, apa yang terjadi di panggung politik kita selama ini mesti dijadikan pelajaran bersama, bahwa 'permusuhan' dalam politik itu tidak abadi. Pada masa kampanye masing-masing harus *all out* memperjuangkan tokoh yang didukungnya. Namun setelah pemilu, ketika tokoh yang didukung kalah, bisa beralih mendukung yang menang dan ikut menikmati hasil kemenangannya.

Karena itu, mari kita terus langgengkan silaturahmi. Para elite, silahkan terus melakukan silaturahmi kepada kawan maupun lawan. Jangan sampai bangsa ini terkoayak karena urusan politik □

Menakar Efektivitas Koalisi Dini

GELARAN Pemilu 2024 masih akan berlangsung 2 tahun ke depan. Peta politik tanah air mulai menghangat sejak Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggaungkan pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Secara teori politik, idealnya koalisi partai politik (parpol) dan penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dilakukan lebih awal.

Maksudnya, agar parpol dan kandidat bisa memiliki lebih banyak kesempatan melakukan sosialisasi dan penetrasi dengan maksimal kepada konstituen. Namun dalam praktik proses pemantapan koalisi dan penentuan kandidat menjadi proses yang krusial karena setiap partai mempunyai perhitungan masing-masing. Karena itu pembentukan koalisi lebih dini bisa jadi tidak efektif,

Keuntungan

Pertama, meski koalisi penting untuk memberikan waktu bagi partai dan kandidat melakukan sosialisasi dan konsolidasi praktiknya partai cenderung memikirkan keuntungan masing-masing jika bergabung dalam sebuah koalisi. Motivasi koalisi adalah pragmatisme dan kendaraan politik kekuasaan.

Jika merujuk Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasangan calon yang diusulkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya.

Bagi parpol menengah ke bawah koalisi menjadi komoditas politik penting. Hal ini disebabkan parpol kelompok ini membutuhkan suara lebih besar untuk dapat mencalonkan kandidat dan minimal mempertahankan kursi mereka di parlemen. Kedua, inisiasi koalisi seharusnya sejalan dengan sistem multipartai presidensial. Dalam sistem itu dimana ambang batas sudah ditentukan undang-undang koalisi mutlak dilakukan.

Paulus Mujiran

Sejumlah ahli politik mengatakan dalam sistem multipartai presidensial cenderung membuat partai-partai politik bergabung dalam sebuah koalisi. Juan Linz dan Arturo Velenzuela dalam buku *The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin America* menyebutkan, sistem presidensial yang dijalankan berdasarkan konstruksi multipartai cenderung akan membuat partai berkonflik



KR-JOKO SANTOSO

dengan yang lain. Koalisi dibentuk sebagai alat untuk meredakan konflik yang terjadi (www.pinterpolitik.com 21/6).

Kehadiran koalisi membuat perbedaan kerap meruncing karena perbedaan ideologi dan kepentingan dapat diredam dengan adanya perasaan senasib sepenanggungan sebagai anggota koalisi. Jika mereka dalam koalisi pendukung pemerintah mereka akan fokus pada kerja-kerja pemerintah. Sementara koalisi oposisi kerap mandul karena tak ada persamaan yang menyatukan.

Koalisi yang dibangun sejak dini mengharuskan kedisiplinan dan kepatuhan partai politik yang menjadi anggota koal-

isi agar tidak membelot untuk kepentingan pragmatisme kekuasaan sebagaimana kerap terjadi belakangan ini. Pembelotan ini selain merusak idealisme koalisi juga mengorbankan tatanan ideal demokrasi yang meniscayakan kekuatan politik pemerintahan.

Peta Perubahan

Agar Koalisi Indonesia Bersatu lebih awet dan langgeng syoggyanya partai-partai yang tergabung dalam koalisi memiliki komitmen politik yang kuat agar tidak mudah bubar di tengah jalan. Karena dibentuk sejak dini tak ada ikatan apapun bagi parpol-parpol ini apalagi tak ada jaminan manisnya kursi kekuasaan.

Peta perubahan dan dinamika politik masih dapat terjadi hingga 2024. Bagi ketiga partai anggota koalisi jika ada tarikan yang lebih kuat atau menjanjikan bukan tidak mungkin menyeberang ke koalisi lain. Tinggal sekarang siapa pengendali dinamika koalisi yang akan menentukan sejauh mana daya tahan bangunan koalisi. Jika tak ada agenda konkret, dapat saja ditafsirkan koalisi ini hanyalah ajang bagi anggota koalisi untuk meningkatkan posisi tawar di hadapan Presiden Joko Widodo. Apalagi tak lama setelah mendeklarasikan koalisi Ketua Umum PAN langsung dilantik menjadi Menteri Perdagangan dan resmi mendukung pemerintah. □

*) **Paulus Mujiran SSos MSi**, pengamat politik, Direktur Kerjasama ChildFund dan USAID YKKS Semarang).

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

'Minyak Kita' Jangan Sampai ke Penimbun

JANJI Mendag untuk segera mengelontor minyak goreng Rp 14.000/liter bagai angin segar sepoi-sepoi bagi kami *wong cilik*. Mudah-mudahan migor yang entah apa namanya nanti, bisa mengatasi derita rakyat. Mudah-mudahan nantinya tak ada antri lagi, seperti yang dijanjikan. Mudah-mudahan 'Minyak Kita' tersebut tidak menumpuk atau diborong tengkulak-tengkulak sehingga kita kesulitan lagi. Kami berharap aparat keamanan bisa mengamankan. Sebab selama ini, tengku-

lak-tengkulak itulah yang membuat rakyat sengsara.

Ide menarik Menteri Perdagangan, untuk membuat kemasan 'Minyak Kita', memang seharusnya demikian. Indonesia seagai salah satu negara penghasil sawit terbesar, kok bisa di 'KO' para tengkulak. Bulog sudah seharusnya memproduksi sendiri dan distribusinya diatur baik. Mudah-mudahan solusi ini lancar, bukan sekadar PHP. □

Ny Emi Hartini, Bawak Cawas, Klaten.

Langkah Menghadapi PPDB Zonasi SMA/SMK

KEPUTUSAN Kepala Dikpora DIY No 1511/KEPKA/2022 tentang SOP PPDB Daring/Online SMA/SMK telah diteraknkan 4 jalur. Ada jalur zonasi, prestasi, perpindahan dan afirmasi. Ini dilakukan untuk menerapkan sekolah yang objektif, transparan, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini akan menimbulkan dampak. Langkah bagaimana yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan dan mekanismenya yang secara online?

Tentu Langkah orang tua adalah mencari informasi mekanisme PPDB dengan berbagai sumber. Misalnya orang tua memahami juknis PPDB,

bertanya kepada tim PPDB ataupun membaca dari berbagai sumber media sosial. Langkah kedua, siapkan syarat-syarat yang harus dilakukan misalnya surat Kartu Keluarga dan persyaratan lain dalam bentuk soft copy. Langkah ketiga adalah mengikuti jadwal yang ada karena ada perbedaan dalam setiap jalurnya misalnya jadwal menngurus tambahan nilai prestasi, pengambilan token. Langkah keempat adalah memantau saat seleksi PPDB berlangsung. Apabila dilakukan maka calon siswa dapat diterima di sekolah yang menjadi pilihannya.

*) **Martini S, Bogoran Tjirenggo Bantul**

Meluruskan Salah Tafsir Perpres 68/2022

DITETAPKANNYA Peraturan Presiden (Perpres) No 68 Tahun 2022 ternyata cukup menimbulkan kegalauan beberapa pihak. Anggapan yang menyatakan Perpres ini multitafsir rasanya perlu diarahkan untuk menemukan penafsiran yang tepat. Sehingga kita tidak perlu menuduh Perpres ini telah melakukan hal buruk, seperti memaksa lembaga kursus pelatihan di bawah binaan K/L tertentu harus pindah ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemeneraker). Atau, lebih buruk, berpotensi menghapus lembaga-lembaga di luar Kemeneraker. Karena seakan-akan Perpres ini mengamanatkan pemusatan kegiatan/program dan strategi pelatihan vokasi ke Kemeneraker.

Dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyampaikan pengantarnya tentang Perpres No 68/2021 ini. Menurutnya, kebalikan dari anggapan-anggapan di atas, Perpres ini justru merupakan perwujudan dari semangat kolaborasi yang hendak dibangun agar setiap *stakeholders* yang selama ini menyelenggarakan pelatihan vokasi bersinergi dan mengintegrasikan program-programnya demi percepatan akses, kualitas, dan relevansi yang dikehendaki.

Koordinasi

Penulis sangat setuju. Karena memang dibutuhkan koordinasi yang baik agar program-program ini dapat berjalan saling menguatkan. Tujuannya adalah percepatan peningkatan akses, kualitas, dan relevansi tadi. Mengingat kita memiliki tantangan besar di bidang ketenagakerjaan saat ini. Bahwa kompetensi tenaga kerja terbesar kita (55%) masih berada di tingkat SMP ke bawah (BPS, 2021) dan tingginya jumlah orang di Indonesia yang masih harus mengikuti pelatihan lagi untuk jenis pekerjaan baru (McKinsey, 2019) sampai 29 juta per tahun adalah tantangan yang harus kita jawab segera.

Wartanto

Dibutuhkan solusi. Dan solusi tersebut dapat diberikan oleh pelatihan vokasi yang sinergis oleh semua lembaga. Maka, penetapan Perpres No 68/2022 ini menjadi sangat tepat.

Dalam hal penafsiran yang menyebutkan bahwa Perpres ini akan menghapus Direktorat Kursus dan Pelatihan dari Kemendikbudristek karena pelatihan vokasi akan berpusat di Kemeneraker, itu termasuk salah tafsir yang mesti kita luruskan kembali. Mengenai pasal 10 ayat (4) dan (5) pada Perpres No 68/2022, kita juga tidak perlu khawatir bahwa lembaga kursus dan pelatihan yang selama ini berada di bawah pembinaan Kemendikbudristek RI, dalam hal ini Direktorat Kursus dan Pelatihan, harus berpindah ke Kemeneraker.

Penafsiran yang tepat adalah Perpres ini mengamanatkan agar seluruh pelatihan vokasi dikoordinasikan dengan Kemeneraker sebagai *stakeholder* yang bertanggung jawab pada pemenuhan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang sesuai dengan dunia usaha-dunia industri. Kemeneraker bertanggung jawab pada pelatihan vokasi nasional yang beberapa tugas utamanya adalah mengesahkan standar kompetensi kerja, menerapkan Sistem Informasi Pasar Kerja, akreditasi lembaga, pengendalian mutu lulusan melalui sertifikasi (BNSP), sampai pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan.

Usia Dibawah 25

Kemendikbudristek tetap menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap anak usia di bawah 25

tahun yang membutuhkan peningkatan kompetensi diri untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya, Kemendikbudristek akan melakukan koordinasi atas program-program yang kami lakukan kepada Kemeneraker. Inilah yang diinginkan Perpres No 68/2022. Sehingga kata kunci 'sinergi, kolaborasi, percepatan akses, mutu dan relevansi' harus menjadi pegangan kita bersama.

Melalui catatan ini saya juga ingin menekankan bahwa pelatihan vokasi perlu didukung semua pihak. Tidak ada percepatan jika dari titik start saja kita belum memiliki pemahaman bersama. Namun saya yakin, kita akan mencapai garis *finish* sesuai target. Jika kita bisa bergandengan tangan mendorong percepatan pelatihan vokasi yang kita idam-idamkan. □

*) **Dr. Wartanto, Setdijten Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi, Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan, Kemendikbudristek RI**

Pojok KR

Migor Rp 14.000/liter segera banjiri supermarket.
- **Semoga bukan hanya janji semata.**

Kendalikan harga bapak jelang Idul Adha.
- **Jangan sampai terjadi lonjakan.**

Daya tampung SMA/SMK negeri terbatas.
- **Sekolah swasta dan madrasah siap menerima.**

Beraba

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafiis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkry23@yahoo.com, iklankrkry13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Wakil dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Wakil: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd, Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP